

# **EKSTRAKSI TANPA SOLUSI: PENOLAKAN BURUH TERHADAP PEMOTONGAN GAJI PADA PROGRAM TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)**

**Laila Annisa Fitri**

Email: [lailaaaff@gmail.com](mailto:lailaaaff@gmail.com)

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak melalui skema tabungan wajib. Kebijakan ini mewajibkan pekerja menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai iuran Tapera. Namun dalam implementasinya, kebijakan ini memunculkan berbagai bentuk penolakan dari kalangan buruh di berbagai daerah, termasuk Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan buruh terhadap kebijakan pemotongan gaji pada program Tapera serta bentuk-bentuk mobilisasi gerakan penolakan yang dilakukan oleh organisasi buruh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis penelitian menggunakan teori deprivasi relatif yang dikemukakan oleh Ted Robert Gurr untuk menjelaskan kesenjangan antara harapan kesejahteraan buruh dan kemampuan nyata yang mereka miliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan buruh muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan dan kebijakan negara yang justru menambah beban ekonomi melalui pemotongan gaji wajib. Selain itu buruh menilai bahwa program Tapera tidak memberikan solusi yang jelas terhadap permasalahan kepemilikan rumah bagi pekerja. Penolakan tersebut berkembang dalam dua bentuk utama yaitu jalur terbuka melalui aksi demonstrasi dan mobilisasi massa serta jalur tertutup melalui advokasi kebijakan dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran berpotensi memicu resistensi sosial dan menurunkan legitimasi pemerintah.

**Kata kunci:** Tapera, Buruh, Kebijakan Publik, Gerakan Sosial.

## ABSTRACT

*The People's Housing Savings Program (Tapera) is a government policy designed to help citizens obtain adequate housing through a mandatory savings scheme. This policy requires workers to allocate a portion of their salary as Tapera contributions. However, its implementation has generated various forms of resistance from workers in several regions, including Semarang City. This study aims to analyze the factors underlying workers' resistance to the Tapera salary deduction policy and to examine the forms of mobilization carried out by labor organizations. This research employs a qualitative method with a case study approach. The analysis uses Ted Robert Gurr's theory of relative deprivation to explain the gap between workers' expectations of welfare improvement and their actual economic capabilities. The findings reveal that workers' resistance emerged due to the mismatch between workers' expectations for improved welfare and government policies that increased their economic burden through mandatory salary deductions. Furthermore, workers perceive the Tapera program as failing to provide a clear solution to their housing needs. The resistance developed through two primary channels: open protests through demonstrations and mass mobilization, and closed channels through advocacy and policy lobbying. The study concludes that public policies that do not consider the socio-economic conditions of their target groups may trigger social resistance and potentially reduce governmental legitimacy.*

**Keywords:** *Tapera, Workers, Public Policy, Social Movement.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima secara positif oleh masyarakat. Beberapa kebijakan justru menimbulkan penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang menimbulkan kontroversi di Indonesia adalah Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini dirancang sebagai solusi untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. Pemerintah berupaya menyediakan mekanisme pembiayaan jangka panjang agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan lebih mudah.

Permasalahan perumahan memang menjadi salah satu persoalan struktural yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, backlog perumahan di Indonesia mencapai lebih dari 29 juta keluarga pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian yang layak. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Tapera yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pelaksanaan program Tapera. Program ini mewajibkan pekerja menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan perumahan dengan skema pemotongan gaji sebesar 3%, yang terdiri dari 2,5% kontribusi pekerja dan 0,5% kontribusi pemberi kerja.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian, implementasinya justru menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, terutama buruh. Banyak pekerja menilai bahwa program Tapera justru menambah beban ekonomi mereka di tengah kondisi upah yang relatif stagnan dan biaya hidup yang terus meningkat. Penolakan terhadap kebijakan Tapera tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga muncul dalam berbagai aksi demonstrasi di tingkat daerah. Di Kota Semarang, organisasi buruh melakukan aksi protes sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemotongan gaji dalam program Tapera. Aksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh proses perumusan kebijakan, tetapi juga oleh respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Fenomena penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya dinamika hubungan antara negara dan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera serta bentuk mobilisasi gerakan yang dilakukan oleh organisasi buruh di Kota Semarang.

## TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai munculnya penolakan buruh terhadap kebijakan pemotongan gaji dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika resistensi buruh terhadap kebijakan tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini memiliki dua tujuan utama.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya penolakan buruh terhadap kebijakan pemotongan gaji pada program Tapera, khususnya dalam konteks kondisi sosial ekonomi pekerja di Kota Semarang.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk mobilisasi dan strategi yang digunakan oleh organisasi buruh dalam menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Tapera, baik melalui aksi demonstrasi, advokasi kebijakan, maupun bentuk tindakan kolektif lainnya.

Melalui kedua tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik dan respons sosial masyarakat, khususnya dalam konteks gerakan penolakan buruh terhadap kebijakan negara.

## KERANGKA TEORITIS

### 1. Teori Protes Sosial

Protes sosial merupakan salah satu bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam

konteks kebijakan publik, protes sosial sering muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Protes sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti demonstrasi, mobilisasi massa, advokasi kebijakan, maupun bentuk tindakan kolektif lainnya.

Protes sosial dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika kebijakan publik tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat atau bahkan menimbulkan beban baru bagi kelompok tertentu, maka kelompok tersebut cenderung melakukan mobilisasi kolektif untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Gerakan penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera dapat dipahami sebagai bentuk protes sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak memberikan solusi terhadap kebutuhan pekerja. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi buruh menunjukkan bahwa buruh tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam memperjuangkan kepentingannya.

### 2. Teori Deprivasi Relatif

Penelitian ini menggunakan teori Relative Deprivation yang dikemukakan oleh Ted Robert Gurr dalam karyanya *Why Men Rebel* (1970). Teori ini menjelaskan bahwa konflik sosial dan gerakan protes muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kondisi kehidupan yang diinginkan dengan kemampuan nyata mereka untuk mencapainya.

Gurr menjelaskan bahwa deprivasi relatif terjadi ketika individu atau kelompok merasa bahwa kondisi yang mereka alami tidak sesuai dengan harapan yang mereka miliki. Perasaan ketidakpuasan tersebut muncul karena adanya perbandingan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.

Gurr membagi konsep deprivasi relatif menjadi dua komponen utama, yaitu:

### 1. Value Expectations

Value expectations merupakan harapan individu atau kelompok terhadap kondisi kehidupan yang mereka anggap layak untuk diperoleh. Harapan tersebut dapat berupa peningkatan kesejahteraan, akses terhadap sumber daya ekonomi, maupun perlindungan sosial dari negara. Dalam konteks penelitian ini, buruh memiliki harapan terhadap peningkatan kesejahteraan serta kebijakan negara yang mampu melindungi kondisi ekonomi pekerja.

### 2. Value Capabilities

Value capabilities merupakan kemampuan nyata yang dimiliki individu atau kelompok untuk mencapai kondisi kehidupan yang mereka harapkan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta kebijakan pemerintah. Dalam kasus kebijakan Tapera, buruh merasa bahwa kemampuan ekonomi mereka tidak sejalan dengan kewajiban tambahan berupa pemotongan gaji untuk program tabungan perumahan.

### 3. Kesenjangan antara Value Expectations dan Value Capabilities

Menurut Gurr, konflik sosial muncul ketika terdapat kesenjangan yang besar antara harapan masyarakat dan kemampuan mereka untuk mencapainya. Semakin besar kesenjangan tersebut, semakin besar pula kemungkinan munculnya ketidakpuasan kolektif yang kemudian berkembang menjadi gerakan protes.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan Tapera dianggap oleh buruh sebagai kebijakan yang memperbesar kesenjangan antara harapan kesejahteraan pekerja dan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan penolakan terhadap kebijakan Tapera.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika penolakan buruh terhadap kebijakan pemotongan gaji dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman aktor sosial yang terlibat dalam gerakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kasus penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera di Kota Semarang, yang menjadi salah satu daerah dengan mobilisasi gerakan buruh dalam menolak kebijakan pemotongan gaji pada program Tapera. Studi kasus digunakan untuk memahami secara komprehensif bagaimana dinamika penolakan buruh terjadi serta bagaimana strategi mobilisasi gerakan dilakukan oleh organisasi buruh.

## Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi salah satu pusat aktivitas organisasi buruh dalam melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Tapera. Subjek penelitian dalam studi ini adalah para aktor yang terlibat langsung dalam gerakan penolakan kebijakan Tapera, khususnya organisasi serikat buruh yang memiliki peran dalam mobilisasi aksi.

Beberapa organisasi buruh yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
3. Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI)
4. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN)

Dari hasil wawancara dan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait aksi penolakan terhadap kebijakan Tapera.

## JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan organisasi buruh yang terlibat dalam gerakan penolakan kebijakan Tapera. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai alasan penolakan, strategi mobilisasi gerakan, serta pandangan buruh terhadap kebijakan Tapera.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi buruh, publikasi media massa, serta literatur akademik yang relevan dengan penelitian ini.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang berasal dari organisasi buruh. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai dinamika penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan serta strategi yang digunakan dalam mobilisasi gerakan.

### 2. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait kebijakan Tapera serta berbagai bentuk aksi penolakan yang dilakukan oleh organisasi buruh. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan organisasi buruh, pemberitaan media massa, serta dokumen kebijakan pemerintah.

## ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses seleksi, pemilahan, dan

penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

## 2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

## 3. Justifikasi Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera serta bentuk mobilisasi gerakan yang dilakukan oleh organisasi buruh.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera dalam konteks kebijakan publik dan gerakan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dinamika Penolakan Buruh terhadap Kebijakan Tapera**

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian melalui mekanisme tabungan wajib. Kebijakan ini mengharuskan pekerja menyisihkan sebagian penghasilannya sebesar 3 persen untuk program tabungan perumahan. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan sebagai solusi terhadap permasalahan backlog perumahan di Indonesia, implementasinya justru

menimbulkan penolakan dari kalangan buruh.

Penolakan terhadap kebijakan Tapera muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pekerja. Dalam konteks Kota Semarang, penolakan tersebut diwujudkan melalui mobilisasi gerakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi buruh. Gerakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menolak kebijakan Tapera, tetapi juga untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah terkait kondisi kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera dapat dipahami melalui tiga aspek utama, yaitu faktor ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan Tapera, penyampaian tuntutan oleh organisasi buruh, serta mobilisasi gerakan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

### Faktor Ketidakpuasan Buruh terhadap Kebijakan Tapera

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera adalah adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemotongan gaji yang dianggap menambah beban ekonomi pekerja. Banyak buruh menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pekerja yang masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup.

Dalam konteks ini, pemotongan gaji sebesar tiga persen melalui program Tapera dipandang sebagai kebijakan yang menambah beban finansial pekerja. Kondisi

ini menjadi semakin kompleks ketika dihubungkan dengan situasi ekonomi yang tidak stabil serta tingkat upah yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi sebagian pekerja. Selain itu, buruh juga menilai bahwa program Tapera tidak memberikan kepastian mengenai akses kepemilikan rumah bagi pekerja. Banyak pekerja meragukan efektivitas program tersebut dalam membantu buruh memperoleh hunian yang layak. Ketidakjelasan mekanisme manfaat yang akan diterima oleh peserta program menjadi salah satu alasan munculnya ketidakpercayaan terhadap kebijakan tersebut.

Faktor lain yang turut memperkuat ketidakpuasan buruh adalah kurangnya partisipasi pekerja dalam proses perumusan kebijakan Tapera. Organisasi buruh merasa bahwa kebijakan tersebut disusun tanpa melibatkan aspirasi pekerja secara memadai. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan Tapera lebih mencerminkan kepentingan pemerintah dibandingkan kebutuhan pekerja. Apabila dianalisis menggunakan teori deprivasi relatif dari Ted Robert Gurr, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *value expectations* dan *value capabilities*. Buruh memiliki harapan terhadap peningkatan kesejahteraan serta perlindungan ekonomi dari negara, namun kebijakan Tapera justru dianggap memperbesar beban ekonomi pekerja. Kesenjangan antara harapan dan kemampuan ini kemudian memicu munculnya rasa ketidakpuasan kolektif yang menjadi dasar bagi munculnya gerakan penolakan.

## Penyampaian Tuntutan Serikat Buruh dalam Menolak Tapera

Penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui penyampaian tuntutan secara kolektif oleh organisasi buruh. Organisasi buruh memainkan peran penting dalam mengorganisasi aspirasi pekerja serta mengartikulasikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Dalam proses penyampaian tuntutan tersebut, organisasi buruh berperan sebagai mediator antara pekerja dan pemerintah. Melalui organisasi buruh, berbagai aspirasi pekerja terkait kebijakan Tapera disampaikan secara kolektif dalam bentuk pernyataan sikap maupun tuntutan kebijakan. Tuntutan utama yang disampaikan oleh organisasi buruh berkaitan dengan penolakan terhadap kebijakan pemotongan gaji dalam program Tapera. Buruh menilai bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak dibebankan kepada pekerja, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Selain itu, organisasi buruh juga menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Tapera serta mempertimbangkan kembali implementasinya.

Penyampaian tuntutan tersebut dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi politik, baik secara formal maupun informal. Secara formal, organisasi buruh menyampaikan aspirasi melalui dialog dengan pemerintah maupun melalui lembaga legislatif. Sementara itu, secara informal tuntutan buruh juga disampaikan melalui media massa serta berbagai platform komunikasi publik. Dalam perspektif gerakan sosial, penyampaian tuntutan

tersebut merupakan bagian dari strategi mobilisasi kolektif yang dilakukan oleh organisasi buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Strategi ini menunjukkan bahwa buruh tidak hanya menjadi objek kebijakan publik, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam mempengaruhi proses kebijakan.

### **Mobilisasi Gerakan Penolakan terhadap Kebijakan Tapera**

Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, organisasi buruh juga melakukan mobilisasi gerakan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Tapera. Mobilisasi gerakan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk aksi kolektif yang bertujuan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap aspirasi buruh. Salah satu bentuk mobilisasi gerakan yang paling menonjol adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi buruh. Demonstrasi menjadi sarana bagi buruh untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Tapera secara langsung kepada pemerintah. Aksi demonstrasi tersebut juga menjadi bentuk solidaritas antar pekerja dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Mobilisasi gerakan penolakan terhadap Tapera tidak hanya dilakukan di Kota Semarang, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap kebijakan Tapera merupakan fenomena nasional yang melibatkan berbagai organisasi buruh.

Selain demonstrasi, mobilisasi gerakan juga dilakukan melalui berbagai bentuk kampanye publik. Organisasi buruh memanfaatkan media sosial serta jaringan

organisasi untuk menyebarkan informasi mengenai dampak kebijakan Tapera terhadap pekerja. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu yang dihadapi oleh pekerja serta memperoleh dukungan dari masyarakat. Dalam konteks teori deprivasi relatif, mobilisasi gerakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk respons kolektif terhadap ketidakpuasan sosial. Ketika kesenjangan antara harapan dan kenyataan semakin besar, kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akan cenderung melakukan mobilisasi kolektif untuk memperjuangkan kepentingannya. Gerakan penolakan terhadap kebijakan Tapera menunjukkan bahwa buruh memiliki kapasitas untuk melakukan mobilisasi kolektif dalam merespons kebijakan publik yang dianggap merugikan. Mobilisasi tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika gerakan sosial dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.

### **Analisis Penolakan Tapera dalam Perspektif Deprivasi Relatif**

Apabila dianalisis menggunakan teori deprivasi relatif, penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera dapat dipahami sebagai akibat dari kesenjangan antara harapan kesejahteraan buruh dan kondisi ekonomi yang mereka alami. Buruh memiliki harapan bahwa kebijakan negara seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat. Namun kebijakan Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji justru dianggap sebagai kebijakan yang menambah beban ekonomi pekerja. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tersebut tidak

memberikan manfaat yang sebanding dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh pekerja. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut memicu munculnya rasa ketidakpuasan kolektif di kalangan buruh. Ketidakpuasan ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang diwujudkan melalui aksi demonstrasi serta mobilisasi gerakan penolakan terhadap kebijakan Tapera.

Dengan demikian, penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera dapat dipahami sebagai bentuk respons sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pekerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakan tersebut, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterima oleh kelompok masyarakat yang terdampak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan buruh terhadap kebijakan pemotongan gaji dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan bentuk respons kolektif terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, penolakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan persepsi buruh terhadap beban ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan Tapera, ketidakjelasan manfaat program bagi pekerja, serta kurangnya partisipasi buruh dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam perspektif teori deprivasi relatif Ted Robert Gurr, penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera dapat dipahami sebagai akibat dari kesenjangan antara *value expectations* dan *value capabilities*. Buruh memiliki harapan terhadap kebijakan negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memberikan solusi terhadap permasalahan perumahan. Namun kebijakan Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji justru dipersepsikan sebagai kebijakan yang menambah beban ekonomi pekerja tanpa memberikan kepastian terhadap akses kepemilikan rumah. Kesenjangan antara harapan dan kemampuan tersebut memicu munculnya rasa ketidakpuasan kolektif yang kemudian berkembang menjadi gerakan penolakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan buruh terhadap kebijakan Tapera berkembang melalui berbagai bentuk mobilisasi gerakan sosial. Organisasi buruh memainkan peran penting dalam mengorganisasi aspirasi pekerja serta memobilisasi gerakan penolakan melalui aksi demonstrasi, penyampaian tuntutan kebijakan, serta kampanye publik. Mobilisasi gerakan tersebut menunjukkan bahwa buruh tidak hanya menjadi objek kebijakan publik, tetapi juga aktor sosial yang aktif dalam mempengaruhi proses kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakan tersebut, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat yang terdampak. Kebijakan publik yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai berpotensi menimbulkan resistensi sosial

serta memicu munculnya gerakan penolakan dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta meminimalkan potensi konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan Tapera, khususnya terkait dengan mekanisme pembiayaan serta manfaat yang akan diterima oleh pekerja. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab permasalahan perumahan masyarakat tanpa menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi pekerja.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama dengan melibatkan organisasi buruh sebagai representasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang lebih inklusif dapat membantu pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mencegah munculnya resistensi terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Ketiga, organisasi buruh diharapkan dapat terus memainkan peran strategis sebagai mediator antara pekerja dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi pekerja secara konstruktif. Selain melalui aksi demonstrasi, organisasi buruh juga dapat memperkuat strategi advokasi kebijakan

melalui dialog dengan pemerintah serta melalui berbagai mekanisme partisipasi politik lainnya.

Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih jauh mengenai dinamika hubungan antara kebijakan publik dan gerakan sosial dalam konteks kebijakan kesejahteraan di Indonesia. Kajian yang lebih luas mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan publik dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi kebijakan publik dan gerakan sosial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayo Medan.com. ( 2024). Dinilai Membodohi Buruh, Serikat Buruh Sumut Tolak  
<https://www.ayomedan.com/2024/06/dinilai-membodohi-buruh-serikat-buruh.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang.(2025). Kota Semarang Dalam Angka 2025
- CNBC Indonesia. Backlog Perumahan di Indonesia Tinggi, Ini Pemicunya.(2023, Agustus 09)  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230809195212-8-461619/backlog-perumahan-di-indonesia-tinggi-ini-pemicunya>
- Federasi Serikat Pekerja Independen. (2015)  
<https://fspindependen.wordpress.com/page/2/>
- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). (2025) <https://fspmi.or.id/>
- Fiska, M. (2024). Ratusan Buruh di Semarang Demo Tolak Tapera, Cuma Jadi Beban dan Memberatkan.  
<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412851082/ratusan-buruh-di-semarang-demo-tolak-tapera-cuma-jadi-beban-dan-memberatkan>

- Fitrah, M. (2017). Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. *Sukabumi: CV Jejak*.
- Huda, N & Bhima Yudhistira. (2024). Tapera untuk (Si)Apa ? Membedah Untung Rugi program Tabungan Perumahan Rakyat. Celios
- Harrison,L.(2001). *Political Research*. Routledge. Hlm. 198
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (2024) <https://www.kspicitu.org/>
- Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).(2021) <https://www.kspncenter.com/>
- Kristeva, N.S.S. (2016) Sekolah Gersos : Wacana Gerakan Sosial Untuk Membangkitkan Semangat Perlawanan, Membela Rakyat Yang Terhisap & Tertindas, Untuk Pemberdayaan Masyarakat Sipil. Hlm. 380
- Kusumastuti,A dan Ahmad, M.K. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang. Lembaga Pendidikan Sukaro Pressindo (LPSP)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). BP Tapera: Skema Tapera Bukan Beban Finansial. <https://www.mkri.id/berita/bp-tapera:-skema-tapera-bukan-beban-finansial-21887>
- Mahkamah Konstitusi. UU Tapera Inkonstitusional Jika Tidak Ditata Ulang Dalam 2 Tahun. 2025 <https://www.mkri.id/berita/uu-tapera-inkonstitusional-jika-tidak-ditata-ulang-dalam-2-tahun-23845>
- Maulana, D., Syafitri, N., Al-Hambra, S., Susanti, R., Rifaldy, E., & Ahmad, R. (2025). Analisis program Tapera berdasarkan teori keadilan John Rawls. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1).
- Naibaho, A., Setiawan, P. A. H., & Hartana, H. (2024). Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA). *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2(12).
- Nasution, A. F . Metode Penelitian Kualitatif. Medan. CV Harva Creative.
- Pastika, D. B. W., Suryana, E. P., Rizal, M., & Palestina, F. A. (2025). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). *Law, Development and Justice Review*, 8(2), 195-214.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
- Redaksi Kponline. Partai Buruh : Jangan Bebani Buruh dan Rakyat Dengan Tapera.
- Koran Perdjoengan, 2024 <https://www.koranperdjoengan.com/partai-buruh-jangan-bebani-buruh-dan-rakyat-dengan-tapera/>
- Robert, G.T.(2011). *Why Men Rebel*. Paradigm Publishers
- Rochadi,AF.S.(2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*.
- Salampesy,M,dkk.(2023). Kebijakan Publik. CV Gita Lentera. Cet.1, hlm2
- Samuella, E. J., & Susanti, I. (2025). Tapera: Melindungi Hak atas Tempat Tinggal atau

Mengancam Kehidupan yang Layak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(4), 727-752.

Sari Haryanti Puspa & Aprillia Ika. (2024). Serikat Buruh Akan Gelar Demo Tolak Tapera di Depan Istana.

<https://money.kompas.com/read/2024/06/04/133000326/kamis-serikat-buruh-akan-gelar-demo-tolak-tapera-di-depan-istana?page=all>

Siswahyudi, S., Arifin, S., Faizal, S., Yuliana, R., Lubis, A. H., & Rahdar, A. H. A. (2024). Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 6(3), 239-245.

SM, P. P., & Naldo, R. A. C. (2025). Pemotongan Gaji Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). *Jurnal Panah Keadilan*, 4(2), 1-13

Tim iNews.id. (2024). Tolak Tapera, Ratusan Buruh di Subang Gelar Unjuk Rasa.

<https://subang.inews.id/read/454604/tolak-tapera-ratusan-buruh-di-subang-gelar-unjuk-rasa>

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40

Wawan Jauh Hari. (2024). Buruh Gelar Aksi Tolak Tapera di Disnakertrans

DIY, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7377103/buruh-gelar-aksi-tolak-tapera-di-disnakertrans>

[diy#:~:text=Puluhan%20buruh%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20%28DIY%29](https://www.detik.com/jogja/berita/d-7377103/buruh-gelar-aksi-tolak-tapera-di-disnakertrans#:~:text=Puluhan%20buruh%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20%28DIY%29)

[%20menggelar,buruh%20itu%20bergantian%20berorasi%20di%20depan%](https://www.detik.com/jogja/berita/d-7377103/buruh-gelar-aksi-tolak-tapera-di-disnakertrans#:~:text=Puluhan%20buruh%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20%28DIY%29%20menggelar,buruh%20itu%20bergantian%20berorasi%20di%20depan%20kantor%20Disnakertrans)

[20kantor%20Disnakertrans](https://www.detik.com/jogja/berita/d-7377103/buruh-gelar-aksi-tolak-tapera-di-disnakertrans#:~:text=Puluhan%20buruh%20di%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20%28DIY%29%20menggelar,buruh%20itu%20bergantian%20berorasi%20di%20depan%20kantor%20Disnakertrans).

West, G dan Rhoda L.B. (1990). *Women and Social Protest*. New York. Oxford

University Press. Hlm. 5-6

Yin, R.K. (2023). Studi Kasus: Desain & Metode. Terjemahan Dr. Iswadi, M.Pd.;

Prof. Dr. Hj Neti Karnati, M.Pd; & Ahmad Andry B, M.Pd. Penerbit Adab